

## PROXY WAR DAN TANTANGAN NEGARA BANGSA

Makhfira Nuryanti

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

Email: *maghfirahnuryanti@gmail.com*

### Abstrak

*Proxy war* kini menjadi ancaman bagi kedaulatan berbagai bangsa, tak terkecuali dunia Muslim, baik itu negara Islam atau negara bangsa dengan mayoritas masyarakatnya Islam, seperti Indonesia. Tuntutan kepentingan kelompok telah menciptakan perang-perang jenis baru. *Proxy war* tergolong ke dalam ancaman besar sebuah ketahanan negara karena dapat menghancurkan sebuah bangsa dalam keheningan, negara yang menjadi sasaran atau target tidak menyadari bahwa negaranya sedang diporak-porandakan. *Proxy war* kini menjadi ancaman bagi kedaulatan berbagai bangsa, tak terkecuali dunia Muslim, baik itu negara Islam atau negara bangsa dengan mayoritas masyarakatnya Islam, seperti Indonesia. menggunakan cara cara licik, penuh muslihat (*tricky*), yakni memakai pihak ketiga untuk menaklukkan lawan, biasanya memanfaatkan negara lain yang lebih kecil atau bisa pula menggunakan aktor non negara seperti ormas, LSM, kelompok masyarakat atau bisa juga melalui perseorangan. *Proxy war* ini sulit dideteksi, mana kawan dan mana lawan, apalagi di situasi masyarakat yang terpecah belah. Tantangan ini serius, untuk mengatasinya dibutuhkan persatuan dan kesatuan berbangsa dan bernegara. Negara harus fokus pada musuh yang sesungguhnya, yakni yang jelas-jelas ingin mengeruk keuntungan dari sebuah bangsa. Cara terbaik untuk melawan *proxy war* adalah dengan mengenali musuh, kemampuan mengenali musuh ini bisa kita peroleh jika kesadaran masyarakat akan pentingnya kesatuan dan persatuan bangsa sudah muncul.

**Kata Kunci:** Proxy war; Tantangan; Negara Bangsa.

### A. Pendahuluan

“Ancaman Proxy War” sebuah judul dalam *Studium Generale* di ITB 2016 lalu, Komandan Sesko TNI Letjen Agus Sutomo, menjelaskan tentang ancaman besar bagi negara yang menurutnya sudah berbeda. Jika dulu ancaman adalah berupa ajakan baku hantam senjata, sekarang musuh

bisa saja melucuti apa yang kita punya tanpa kita merasa menderita.<sup>1</sup> Di era yang semakin modern ini, ancaman dapat menyelundup dan menghancurkan negara dalam keheningan hingga akhirnya kita sadari negara sudah porak-poranda dari segi ekonomi, pendidikan, dan mental sumber dayanya.

Ini pula yang sebelumnya pernah disampaikan Letjen TNI Gatot Nurmantyo dalam Kuliah Umum bertajuk “Peran Pemuda dalam Menghadapi Proxy War” di UI tahun 2014,<sup>2</sup> bahwa sifat dan karakteristik perang saat ini telah bergeser seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Digambarkan bahwa di masa yang akan datang, ketika energi fosil diprediksi menipis pada 2043, kawasan dengan sumber bio energi, menjadi wilayah perebutan dan menjadi ajang konflik sebagai akibat tarik-ulur kepentingan yang mengarah pada lokasi dan wilayah sumber pangan sekaligus sumber energi tersebut.

Bertambah pesatnya populasi penduduk dunia yang tidak diimbangi dengan ketersediaan pangan, air bersih dan energi akan menjadi pemicu munculnya konflik-konflik baru. Dengan adanya tuntutan kepentingan kelompok, telah menciptakan perang-perang jenis baru di antaranya perang asimetris (semisal perang gerilya), perang hibrida (konvensional, asimetris dan perang informasi) dan *proxy war*, sehingga kemungkinan terjadinya perang konvensional antar dua negara dewasa ini semakin kecil. Dalam konteks keamanan global, abad ini dapat dikategorikan sebagai abad peperangan proksi, dimana bisa kita lihat Timur Tengah menjadi

---

<sup>1</sup>Hasil *Studium Generale* ini disarikan dalam Vinskatania Agung A, *Lawan Proxy War Menuju Indonesia Emas 2045*, (2016). Lihat <https://www.itb.ac.id/news/5100.xhtml> diakses pada 9 Mei 2019, Pukul 10.03 WIB.

<sup>2</sup>Pernyataan ini dikutip dalam Mayor Inf Dony Gerdinand, “Pendidikan Pendahuluan Bela Negara di Era Proxy War”, dalam *Jurnal Sekolah Staf dan Komando TNI AD*, (Edisi Khusus, November 2016), hal. 19.

kawasan yang secara kasat mata telah lebih dahulu memasukinya. Ini dapat dilihat pada *Arab Spring* yang kemudian menghasilkan Perang Sipil di Suriah yang menurut Alterman adalah perang proksi paling aktif dewasa ini.<sup>3</sup>

Seperti pernyataan Letjen Agus Sutomo sebelumnya, bahwa *proxy war* tergolong ke dalam ancaman besar sebuah ketahanan negara karena dapat menghancurkan sebuah bangsa dalam keheningan, negara yang menjadi sasaran atau target tidak menyadari bahwa negaranya sedang diporak-porandakan. Seperti yang terjadi antara Arab Saudi dan Iran, di balik kemelut antar kedua negara, ada pihak lain yang dengan kepentingannya terus menyulut situasi konflik dan memperlihatkan seolah ini adalah perang dengan semangat keagamaan, antar Sunni dan Syiah, seperti yang ditampilkan dalam berbagai media.

*Proxy war* tidak melulu melalui kekuatan militer, tetapi juga perang melalui berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara baik melalui politik, melalui ekonomi, maupun sosial budaya, termasuk hukum. Untuk itu, sudah sepatutnya masalah *proxy war* ini menjadi perhatian utama, demi menjaga ketahanan nasional setiap bangsa, khususnya negara-negara Muslim yang tampaknya mudah terprovokasi dan menjadi *easy target* bagi negara-negara adidaya, seperti Amerika.

## **B. Pembahasan**

### **1. Memahami Proxy War**

Dalam perspektif Indonesia, seperti yang dituliskan Hidayat, bahwa isu mengenai *proxy war* ini semakin besar setelah Jenderal TNI Gatot

---

<sup>3</sup>John B Alterman, "The Age of Proxy Warfare", dalam *Middle East Notes and Comment, CSIS Middle East Program*, (May 2013), hal. 1

Nurmantyo melakukan sosialisasi ke berbagai pendidikan tinggi, organisasi masyarakat dan pemuda serta berbagai kalangan di Indonesia mengenai ancaman *proxy war*. *Proxy war* dalam bahasa Indonesia memiliki pengertian perang perpanjangan tangan.<sup>4</sup> Perang yang dilakukan oleh satu pihak kepada pihak lain dengan menggunakan pihak ketiga yang berasal dari dalam negara itu sendiri atau aktor lain yang beroperasi tentu saja dengan memanfaatkan masyarakat lokal atau setempat.

Berikut kutipan-kutipan yang menjelaskan tentang apa itu *proxy war*. Dalam *reference.com*, *proxy war* diartikan sebagai berikut: “A *proxy war* is a conflict inflicted by a major power or powers that do not become involved in it directly. Often, proxy wars involve countries fighting their opponents’ allies or helping their allies fight their opponents.”<sup>5</sup>

Kamus *Oxford Online* memiliki pengertian tentang *proxy war* yang kurang lebih sama, yaitu: *a war instigated by a major power which does not itself become include*.<sup>6</sup> Dalam istilah yang dikemukakan oleh Loveman,<sup>7</sup> pemegang mandat *proxy war* hanyalah kepanjangan tangan dari suatu negara yang berupaya mendapatkan kepentingan strategisnya, lewat cara menghindari keterlibatan langsung. Tidak jauh berbrsa dengan makna *proxy war* yang disampaikan Mumford,<sup>8</sup> yaitu: *...conflicts in which*

---

<sup>4</sup>Safril Hidayat dan Wawan Gunawan, “Proxy War dan Keamanan Nasional Indoneisa: Victoria Concordia Crescit”, dalam *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*, Vol. VII, No. 1, (April 2017), hal. 5.

<sup>5</sup>Proxy War Reference, lihat dalam <https://www.reference.com/> diakses pada 9 Mei 2019, Pukul 10.12 WIB.

<sup>6</sup>English Oxford Living Dictionaries, Proxy war, <https://en.oxforddictionaries.com/> diakses pada 9 Mei 2019, Pukul 10.17 WIB.

<sup>7</sup>Chris Loveman, “Assessing the Phenomenon of Proxy Intervention”, dalam *Conflict, Security and Development*, Vol. 2, No. 3, (December 2002), hal. 30.

<sup>8</sup>Andrew Mumford, “Proxy Warfare and The Future of Conflict”, dalam *The RUSI Journal*, Volume 158, Number 2, (May 2013), hal. 40.

*a third party intervenes indirectly in order to influence the strategic outcome in favour of its preferred faction.* Dalam teori ini, pihak yang berkonflik langsung disebut perpanjangan tangan dan pihak yang memanfaatkan mereka —sekaligus aktor utama— disebut pihak ketiga.

Dalam hal ini, Azyumardi Azra, yang dikutip Sudiaman dalam *Republika*,<sup>9</sup> menjelaskan bahwa *proxy war* atau secara lebih spesifik ‘proxy sectarian war’—perang *proxy* karena sektarianisme keagamaan. Secara singkat, ‘proxy war’ adalah ‘perang boneka di antara dua negara atau lebih tanpa melibatkan secara langsung negara-negara atau warga negara itu sendiri dalam perang terbuka di antara mereka. Perang justru terjadi dan berkobar di negara atau wilayah lain di antara kelompok pro dan anti masing-masing negara yang menjadi semacam ‘boneka’ karena mendapat bantuan dana, pelatihan dan persenjataan dari negara-negara yang bertarung. Oleh karena itu, lazimnya *proxy war* terjadi dan sering berlangsung lama bukan di negara yang berkontestasi. Biasanya *proxy war* terjadi di wilayah lain di luar kedua negara yang saling bermusuhan dan ingin menghancurkan lawannya.

Di dalam *proxy war* terdapat *soft power* dan *hard power*. *Soft power* adalah kemampuan untuk membujuk orang lain untuk melakukan apa yang diinginkan,<sup>10</sup> dimana metode ini akan sulit disadari sebagai sebuah strategi untuk memporak-porandakan sebuah negara. Nye menyatakan bujukan sebagai kekuatan persuasif berdasarkan daya tarik dan emulasi dari sumber daya budaya, ideologi, dan lembaga. Dispersi budaya Amerika dalam Blok Timur selama Perang Dingin menunjukkan adanya

---

<sup>9</sup>Maman Sudiaman, “Proxy War”, dalam *Republika, Kolom Resonansi*, 13 Agustus 2016.

<sup>10</sup>E.J. Wilson, “Hard Power, Soft Power, Smart Power”, dalam *ANNALS of the American Academy of Political and Social Sciences*, Issue 616, (2008), hal. 114.

*soft power* Amerika, dan proses perluasan Uni Eropa merupakan contoh *soft power*.<sup>11</sup> Berbeda dengan *hard power*<sup>12</sup> yang didasarkan pada koersif melalui intervensi militer, diplomasi dan sanksi ekonomi<sup>13</sup> dan bergantung pada sumber daya yang nyata seperti angkatan bersenjata atau kekuatan ekonomi. Contoh penggunaan *hard power* adalah invasi Jerman ke Polandia (1939), dan sanksi ekonomi PBB terhadap Irak (1991) pasca Perang Teluk I.<sup>14</sup>

Efektivitas pendekatan *hard power* dan *soft power* tergantung pada aksesibilitas sumber daya.<sup>15</sup> Negara-negara besar (*major powers*) seperti Amerika Serikat atau Rusia dengan pendapatan nasional yang lebih tinggi mampu secara finansial untuk mempertahankan angkatan bersenjata yang besar, dan menempatkan negara-negara lain secara ekonomi berada di bawah tekanan. Negara-negara yang lebih kecil, dengan minimnya kemampuan *hard power*, namun memiliki kekuatan *soft power* dapat menjadi kekuatan untuk mempengaruhi negara lain seperti halnya Norwegia.<sup>16</sup>

*Proxy war* cenderung dimulai dengan *soft power* mulai dari diplomasi, pemberian donasi, sampai dengan membina kelompok insurjensi (*dissident*) dalam suatu negara. Adagium *enemy's enemy is*

---

<sup>11</sup>Lihat Joseph S. Nye, *Understanding International Conflicts* 7th Edition, (New York: Pearson, 2009), hal. 63.

<sup>12</sup>Lihat Safril Hidayat dan Wawan Gunawan, "Proxy...", hal. 6.

<sup>13</sup>E.J. Wilson, "Hard Power...", hal. 114.

<sup>14</sup>G. Gallarotti, "Soft Power: what it is, it's importance, and the conditions for its effective use", dalam *Journal of Political Power*, Vol. IV, No. 1, (2011), hal. 29.

<sup>15</sup>Safril Hidayat dan Wawan Gunawan, "Proxy...", hal. 6-8. Lihat pula A. Heywood, *Global Politics*, (Basingstoke: Palgrave Foundation, 2011), hal. 72.

<sup>16</sup>Safril Hidayat dan Wawan Gunawan, "Proxy...", hal. 6-8. Lihat pula Joseph S. Nye, *Soft Power: The Means To Success In World Politics*, (New York: Public Affairs, 2004), hal.111-112.

*friend* kerap diimplementasikan dalam melakukan *soft power*. Pada skala tertentu ketika *soft power* tidak efektif lagi maka dilakukan *hard power* dalam bentuk embargo, intervensi politik, dan intervensi militer melalui upaya-upaya penentangan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh lokal melalui organisasinya sejalan dengan keinginan yang telah ditularkan oleh negara-negara besar sesuai dengan kepentingan nasionalnya.<sup>17</sup>

*Proxy war* bagi masyarakat awam mungkin lebih sederhana memahami isu ini lewat pengalaman penjajahan di masa lalu. Dimana ketika itu sejarah mencatat adanya politik pecah belah (*divide et impera*) oleh penjajah Belanda untuk menguasai bumi Indonesia. Lewat cara-cara adu domba di antara komponen bangsa itulah salah satu upaya guna melemahkan kekuatan suatu negara sebelum perang konvensional (perang fisik) dilakukan.<sup>18</sup>

Jika di dalam perang konvensional, perang asimetris dan hibrida beban biaya perang demikian besar, namun tidak demikian halnya dengan perang proksi, perang ini menggunakan cara cara licik, penuh muslihat (*tricky*), yakni memakai pihak ketiga untuk menaklukkan lawan, *proxy* artinya wakil, jadi perang *proxy* adalah memberikan ‘mandat; perang kepada pihak ketiga, biasanya menggunakan negara lain yang lebih kecil atau bisa pula menggunakan aktor non negara seperti ormas, LSM, kelompok masyarakat atau bisa juga melalui perseorangan.

Strategi pelemahan demikian adalah sebuah cara yang dianggap efisien (*low cost*) dalam teori perang. Mumford<sup>19</sup> mengutip pernyataan

---

<sup>17</sup>Safril Hidayat dan Wawan Gunawan, “Proxy..., hal. 8.

<sup>18</sup>Bambang Trisutrisno, “Merawat Sumpah Pemuda untuk Menghadapi *Proxy War*”, *Artikel*, (t.t), hal. 2.

<sup>19</sup>Lihat dalam Andrew Mumford, “Proxy..., hal. 40.

Eisenhower yang menyebut *proxy war* sebagai *the cheapest insurance in the world* sementara Zia ul-Haq –mantan Presiden Pakistan– menyebutnya sebagai sebuah upaya untuk ‘menjaga teko tetap hangat’. Seperti yang disampaikan Mumford dalam tulisannya, yaitu: “*Many of the proxy wars of the Cold War (such as the US’s indirect intervention in Afghanistan during the 1980s) and after (like the recent Iranian proxy involvement against the US military in Iraq) could not have happened without existing local tensions ready to be exploited.*”<sup>20</sup>

Pernyataan Mumford tersebut bisa kita kaitkan dengan *proxy war* yang saat ini masih berlangsung, yaitu perang saudara di Suriah yang sejak 2011 sampai hari ini belum ada tanda-tanda akan berhenti padahal telah merenggut lebih dari 400.000 jiwa. Perang saudara tersebut yang awalnya hanya konflik dalam negeri Suriah, namun saat ini telah melibatkan banyak negara besar di dunia yang kemudian ikut membiayai dan mempersenjatai pihak-pihak yang berkonflik dengan berbagai kepentingan. Dari contoh tersebut membuktikan bagaimana efektifnya penggunaan cara-cara *proxy war* untuk menghancurkan sebuah negara tanpa harus menyerang, menginvasi, atau menguasai negara tersebut secara langsung, melainkan dengan memanfaatkan potensi konflik di dalamnya.

## 2. Motif Proxy War

Dalam beberapa literatur, disebutkan bahwa strategi *proxy war* sendiri sudah dipraktekkan pada masa Perang Dingin<sup>21</sup> pasca World War

---

<sup>20</sup>Andrew Mumford, “Proxy...”, hal. 40.

<sup>21</sup>Meskipun perang proxy yang tercatat pertama terjadi pada awal tahun 1529, hal tersebut tidak umum dilakukan sampai Perang Dingin dimulai, karena adanya perbedaan ideologi dan politik antara dua pemenang Perang Dunia II. Selama Perang Dingin, kedua negara adidaya bersenjata nuklir—Amerika Serikat (AS) dan Uni Soviet—tidak ingin

II. Dalam hal ini, Siman-Tov menjelaskan situasi *proxy war* yang terjadi pada masa tersebut, yaitu sebagai berikut:

*The typical definition of the term war by proxy in the Cold War period is a war between regional states that may be regarded as a substitute for direct confrontation between the superpowers. War by proxy is the result of the invention of nuclear weapons and of the consequent need for the superpowers to avoid coming directly into conflict with each other. Generally we can identify two meanings assigned to the term war by proxy, local war with and without external military intervention.*<sup>22</sup>

*Proxy war* dapat mencegah *superpower* terlibat dalam konflik secara langsung sehingga potensi perang nuklir bisa diminimalisir. *Proxy war* diidentifikasi memiliki dua ciri yaitu perang lokal dan tidak ada intervensi kekuatan militer dari luar. Pihak pelaku utamanya hanya mengendalikan dari jarak jauh dan memberi bantuan atau dukungan baik material maupun non-material sesuai dengan situasi yang ada.<sup>23</sup>

Kekuatan yang terlibat dalam *proxy war* biasanya adalah negara-negara yang memiliki ideologi dan kepentingan yang saling bertentangan satu sama lain. Namun, perang skala besar langsung di antara mereka akan menyebabkan kerusakan besar dan tentunya menimbulkan banyak korban jiwa. Oleh karena itu, mereka lebih suka melakukan *proxy war* di negara-

---

berhadapan secara langsung dalam serangan militer, karena hal itu akan menyebabkan perang nuklir yang menghancurkan. Sebaliknya, baik AS maupun khususnya Uni Soviet berusaha untuk menyebarkan lingkup pengaruh mereka di seluruh dunia, yang menyebabkan banyak perang *proxy* seperti yang terjadi di Yunani, Korea, Afghanistan dan khususnya Vietnam. Penjelasan ini dikutip dari Website Resmi Universitas Pembangunan Nasional, lihat <http://connect.upnyk.ac.id> diakses pada 12 Mei 2019, Pukul 15.14 WIB.

<sup>22</sup>Yaacov Bar Simantov, "The Strategy of War by Proxy", dalam *Cooperation and Conflict*, No. XIX, (New York: Middle East Institute, Columbia University and Department of International Relations, The Hebrew University of Jerusalem, 1984), hal. 263-273.

<sup>23</sup>Siswanto, "Aktualisasi Pancasila sebagai Strategi Menangkal Perang *Proxy* di Indonesia", dalam *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*, Vol. VII, No. 1, (April 2017), hal. 79.

negara berkembang untuk menghindari kerugian dan mencapai beberapa kepentingan tertentu pada saat bersamaan. Pihak ketiga bisa jadi berupa pemerintah negara atau pemerintah daerah yang dibentuk atau didukung oleh kekuatan yang berlawanan, atau angkatan bersenjata, tentara bayaran dan kelompok teroris yang bisa menyerang lawan tanpa menyebabkan perang skala penuh.

Pada masa Perang Dingin yang penuh dengan nuansa *statism*, *self help*, dan *survival* maka masing-masing negara mementingkan isu keamanan (*security*).<sup>24</sup> Kepentingan keamanan sekaligus juga kepentingan politik sehingga *proxy* yang dilakukan berkaitan dengan dua isu tersebut (*high politics*). Pasca Perang Dingin dimana isu perang nuklir tidak lagi menjadi isu utama maka isu ekonomi, teknologi, hak azasi manusia (lebih tepat lagi dalam perspektif ilmu hubungan internasional adalah *human security*), dan isu lingkungan. Bahkan dewasa ini, *struggle for power and the power of influence* berlangsung di luar isu keamanan dan politik walaupun pada akhirnya tetap menyentuh kepentingan keamanan dan politik internasional maupun politik domestik suatu negara.<sup>25</sup>

*Proxy war* dengan motif di luar isu keamanan dan politik bisa dilihat dari banyaknya konflik-konflik di belahan dunia terjadi akibat persaingan kepentingan antar negara untuk menguasai sumber energi. Salah satu contohnya, invasi Iraq ke Kuwait pada 2 Agustus 1990 merupakan jalan pintas memulihkan ekonomi Iraq akibat turunnya harga minyak dipasaran Internasional. Amerika Serikat mengkhawatirkan situasi itu akan

---

<sup>24</sup>Tim Dunne & Brian C. Schmidt, "Realism", dalam John Baylis & Steve Smith (Eds), *The Globalization of World Politics*, 2nd edition, (Oxford: Oxford University Press, 2001), hal. 141-60.

<sup>25</sup>Dick Simpson, James Nowlan, Elizabeth O'Shaughnessy, *The Struggle for Power and Influence in Cities and States*, 1st Edition, (London: Pearson, 2010), hal. 233.

menggoyang harga minyak dunia dan mengganggu pasokan minyak ke negaranya. Dengan berbagai dalih akhirnya Amerika melakukan Invasi ke Iraq dalam operasi militer yang bernama Badai Gurun Padang Pasir atau *Dessert storm*.<sup>26</sup>

Perang Proxy atau *proxy war* merupakan perang antara dua pihak yang tidak saling berhadap-hadapan namun menggunakan pihak ketiga untuk mengalahkan musuh. Perang proxy tidak dapat dikenali secara jelas siapa kawan dan siapa lawan karena musuh menggunakan dan mengendalikan *actor non state*,<sup>27</sup> yang bisa berupa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi massa (Ormas), kelompok masyarakat, maupun perorangan. Indikasi adanya *proxy war* di antaranya gerakan separatis, demonstrasi massa dan bentrok antar kelompok.

Sebagaimana dinyatakan oleh Lord Acton bahwa *all politics tend to power*. Maka, pada hakikatnya segala bentuk *proxy* yang dilakukan oleh kekuatan besar pada suatu negara baik melalui elit politik maupun *Non Governmental Official* (NGO) adalah dalam rangka *struggle for power* ataupun *power of influence*.<sup>28</sup> Menurut Hidayat,<sup>29</sup> motif ini belum tentu ingin menduduki, karena akan berhadapan dengan lembaga internasional dan negara-negara lainnya. Namun demikian dalam beberapa kasus

---

<sup>26</sup>M. Cholil Nafis, "Tantangan Indonesia dalam Menghadapi Proxy War di Era Globalisasi", *Artikel*, (t.t), hal. 2. Lihat dalam <https://cholilnafis.com/> diakses pada 9 Mei 2019, Pukul 10.05 WIB.

<sup>27</sup>Farida Haryoko, "Pangkostrad Letjen TNI Gatot Nurmantyo Ajak Mahasiswa Pangkostrad Letjen TNI Gatot Nurmantyo Ajak Mahasiswa Menangkal Proxy War", dalam *Siaran Pers Universitas Indonesia*, (10 Maret 2014).

<sup>28</sup>Safril Hidayat dan Wawan Gunawan, "Proxy...", hal. 6. Lihat pula dalam Michael A. Innes, *Making Sense of Proxy Wars: States, Surrogates & the Use of Force*, (Dulles Virginia: Potomac Books, 2012) dan Mike Stillman, *Proxy Wars: The Business of War*, (Indiana: Trafford on Demand Pub, 2008).

<sup>29</sup>Safril Hidayat dan Wawan Gunawan, "Proxy...", hal. 5-6.

intervensi dilakukan untuk mengganti rezim yang berkuasa (seperti halnya *Arab Spring*), mempengaruhi pemimpin politik (Amerika Latin dan Afrika), dan tentunya pada akhirnya melanggengkan kekuasaan negara-negara besar di panggung politik internasional baik dalam kerangka kekuasaan (*power*) maupun pengaruh (*influence*).

### 3. Kontestasi *Proxy War* dalam Dunia Muslim

Ketika Perang Dunia kedua berakhir, konstelasi politik international kemudian terbagi menjadi dua poros, yaitu AS dengan negara-negara kapitalis liberal di satu pihak, dan dipihak lain Uni Soviet (Russia ketika itu) dengan negara-negara sosialis-komunis. Inilah yang melahirkan pola hubungan bipolaritas. Perang Dingin bukanlah perang terbuka antara AS dan Soviet namun justru yang terjadi adalah peperangan antara *proxy* alias ‘boneka’ dari kedua negara tersebut, maka dikenallah istilah perang proksi atau *proxy war*, perang yang dimanfaatkan atau Perang Boneka.<sup>30</sup>

Kasus *proxy war* di berbagai kawasan meningkat seiring dengan meningkatnya eskalasi Perang Dingin antar Uni Soviet melawan Amerika Serikat (AS) pada masa lampau.<sup>31</sup> Pada Era Perang Dingin, strategi perang dengan menggunakan *proxy* telah digunakan negara *superpower* (Amerika Serikat dan Uni Sovyet) sebagai sebuah upaya untuk menghindari perang langsung dan terbuka di antara keduanya. Dalam konteks Perang Dingin, setidaknya terdapat dua definisi perang proksi menurut Siman-Tov.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup>Ruli Mustafa, “Memahami *Proxy War*”, dalam *Kompasiana, Kategori Humaniora*, 5 Desember 2017. Lihat <https://www.kompasiana.com/rulimustafa/> diakses pada 9 Mei 2019, Pukul 10.30 WIB.

<sup>31</sup>Siswanto, “Aktualisasi..., hal. 79.

<sup>32</sup>Yaacov Bar-Siman-Tov, “The Strategy of War by Proxy”, dalam *Cooperation and Conflict XIX*, (1984), hal. 263-264 .

Definisi pertama adalah intervensi tidak langsung berupa bantuan senjata maupun logistik perang dari negara *superpower* pada tiap-tiap pihak ataupun salah satu pihak yang berperang. Sementara pada definisi kedua, perang proksi dapat berupa intervensi secara langsung dengan melibatkan pasukan dari negara *superpower* sekiranya proksi lokal yang didukung terancam kalah meskipun bantuan senjata maupun logistik telah diberikan. Contoh perang proksi dari definisi pertama adalah Perang Arab-Israel. Sementara contoh dari definisi kedua adalah Perang Korea dan Perang Vietnam.

Setelah Perang Dingin berakhir, perang proksi masih berlangsung di seluruh negara di Tanduk Afrika dimana periode paling penting dari fenomena tersebut, terjadi selama Perang Eritrea-Ethiopia, terutama pada tahun 1999 ketika terjadi peningkatan besar-besaran terhadap interferensi Etiopia dan Eritrea di Somalia.<sup>33</sup> Namun, perang proksi sebagai sebuah ancaman baru didiskusikan secara hangat ketika konflik Ukraina muncul ke permukaan. Intervensi Rusia pada konflik Ukraina yang kemudian menghasilkan Perang Krimea, telah memunculkan kekhawatiran kembalinya strategi perang menggunakan proksi seperti pada Era Perang Dingin.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup>Muhammad Affan, “Analisis dan Tantangan Muslim Indonesia di Era Perang Proksi”, dalam *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. XVIII, No. 2, (2018), hal. 152. Lihat pula Jon Abbink, “Ethiopia-Eritrea: Proxy Wars and Prospects of Peace in the Horn of Africa”, dalam *Journal of Contemporary African Studies*, 21, 3, (September 2003), hal. 414.

<sup>34</sup>Robert Heinsch, “Conflict Classification in Ukraine: The Return of the Proxy War?”, dalam *Int’l L. Stud. Ser. US Naval War Col.* 91, (2015), hal. 323.

Selain Perang Krimea, Perang di Yaman<sup>35</sup> juga dikategorikan sebagai sebuah perang proksi yang melibatkan Arab Saudi dan Iran. Kontestasi antara Arab Saudi dan Iran menjadi sebuah paradigma baru dalam diskursus perang proksi khususnya di kawasan dunia Muslim.<sup>36</sup> Ini menjadi pembeda antara perang proksi di Era Perang Dingin yang secara umum hanya melibatkan Amerika Serikat dan Uni Sovyet sebagai aktor utama. Sementara di dalam dunia Muslim, aktor utama tersebut adalah Saudi dan Iran.<sup>37</sup>

Di samping Perang Yaman, Perang Sipil Suriah adalah perwujudan lain dari pertarungan antara Saudi dan Iran. Dalam pergolakan dan perang sipil di Suriah sekarang ini, menurut As'ad Abu Khalil, guru besar Ilmu Politik di California University Amerika Serikat, seperti yang dikutip oleh Abdullah,<sup>38</sup> ada 8 jenis *proxy war* yang bermain, berkait-kelindan, berkecamuk memperebutkan kekuasaan di Suriah yang berakibat porak-porandanya tatanan masyarakat dan sosial-politik Suriah sekarang ini, yaitu: 1) the Internal Wahhabi war; 2) the Iranian-Saudi war; 3) the Sunni-

---

<sup>35</sup>Yaman merupakan negara yang menjadi korban *proxy war*, dimana terdapat kelompok pemberontak Syiah, Houthi, yang berhubungan dengan Iran. Iran kerap menyelundupkan senjata-senjata militer ke Yaman yang ditujukan kepada Houthi. Sedangkan Saudi mengirimkan kekuatan militernya untuk menggempur Houthi guna membendung kekuatan Iran di Yaman dengan dalih untuk mendukung pemerintahan resmi Yaman di bawah Presiden Abd Mansour Hadi.

<sup>36</sup>Secara khusus, Arab Saudi-Iran memiliki hubungan bilateral yang rumit. Meskipun keduanya sama-sama merupakan negara Islam. Rivalitas Arab Saudi-Iran seringkali mewarnai peperangan di kawasan Timur Tengah. Sebut saja Perang Iran-Irak, Perang Saudara Yaman, Perselisihan Arab Saudi-Lebanon, dan Krisis Diplomati Qatar. Lihat dalam Heriawan dan Siti Muslikhati, *Keputusan Arab Saudi Melakukan Perang Proksi terhadap Iran di Konflik Suriah 2011-2018*, Naskah Publikasi, (Prodi HI, FISIP, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018), hal. 2-3.

<sup>37</sup>Muhammad Affan, "Analisis...", hal. 152-153.

<sup>38</sup>M. Amin Abdullah, "Menengok Kembali Peran Agama di Ruang Publik", dalam *Jurnal Sosiologi Agama*, Vol. XI, No. 2, (Juli-Desember 2017), hal. 171.

Syria war; 4) the Russian-American war; 5) Qatri and Saudi conflict; 6) the Hezbollah versus the Future Movement; 7) the Clash of Islamic Identities; 8) the regional conflict between the global organization of Muslim Brotherhood on one hand and the regional Salafis on the other.

Affan<sup>39</sup> dalam tulisannya mengatakan, akar perang sipil di negeri Suriah tersebut sesungguhnya bermula dari luar negeri itu sendiri dalam bentuk gelombang *Arab Spring* yang menyapu Tunisia, Libya, dan Mesir. *People power* yang berhasil mengganti pemerintahan di negara-negara tersebut menginspirasi oposisi pemerintah untuk mengulang kesuksesan yang sama dengan metode yang sama pula. Namun, hanya dalam waktu sekitar tiga bulan sejak gelombang protes besar pertama dilancarkan, negeri tersebut telah terjerumus ke dalam perang sipil yang secara umum adalah perang antara pemerintah Suriah melawan oposisi yang mengangkat senjata.

Namun, situasinya tidak sesederhana itu, karena terdapat banyak intervensi dari luar pada konflik itu sendiri. Bagi Rusia, Pemerintah Suriah adalah sekutu lamanya yang terlalu mahal untuk dibiarkan jatuh. Sehingga, intervensi Rusia ke dalam perang tersebut dengan mendukung pemerintahan Bashar Assad adalah sebuah usaha untuk melindungi sekutu dan kepentingannya sendiri. Selain Rusia, Iran juga melakukan intervensi dengan mendukung Bashar Assad yang merupakan seorang Syiah.<sup>40</sup> Di

---

<sup>39</sup>Muhammad Affan, "Analisis...", hal. 153.

<sup>40</sup>Iran-Suriah memiliki kerja sama militer yang telah berlangsung lama. Terhitung dari tahun 2006, pakta pertahanan keduanya telah terbentuk. Kala itu, pakta pertahanan tersebut digunakan untuk melawan Amerika Serikat di Perang Irak. Iran memandang perang Suriah sebagai bagian dari perlawanan terhadap Dunia Barat yang sedang memperluas pengaruhnya ke negara-negara Arab. Iran bahkan menyebut Arab Saudi 'budak Barat'. Lihat B. Svensson, *Peran Iran dalam Perang Suriah*, (19 Februari 2013). Dikutip dari Situs Web Deutsche Welle: <http://www.dw.com/id/peran-iran-dalam-perang-suriah/a-16610186>, diakses pada 12 Mei 2019. Iran dengan tegas menyatakan

sisi yang lain, Amerika Serikat, Prancis, Saudi dan Turki memberikan dukungan kepada oposisi bersenjata. Kehadiran Iran dan Saudi di masing-masing kubu memunculkan aroma perseteruan antara Syiah dan Wahabi. Sehingga, konflik tersebut juga dinilai sebagai pertarungan antara Syiah melawan Wahabi.<sup>41</sup>

Di dalam Dunia Muslim sendiri, konflik di Suriah kemudian menjadi begitu bernuansa sektarian. Muslim di banyak belahan dunia sepertinya lebih banyak disugahi informasi mengenai kontestasi Syiah dan Wahabi di Suriah ketimbang persoalan peperangan proksi yang sedang terjadi di sana. Padahal, ancaman besar yang sedang mengancam Muslim di seluruh dunia adalah perang proksi yang dapat memecah belah Muslim di suatu negara. Bukan hanya terpecah belah, perang proksi sebagai sebuah metode juga dapat membinasakan Muslim di mana saja.

Bercermin pada Suriah, perang sipil di negeri itu sesungguhnya adalah perang saudara antara sesama Muslim Suriah yang diperkeruh dengan kehadiran intervensi-intervensi asing yang membawa kepentingan mereka sendiri-sendiri. Bagian terbesar dari korban jiwa di Suriah adalah Muslim, dan bagian terbesar dari kerusakan properti di Suriah adalah milik Muslim. Sehingga, kebinasaan dan kehancuran di Suriah adalah kebinasaan dan kehancuran Muslim. Di masa depan, tidak ada jaminan bagi Suriah akan tetap menjadi sebuah negeri yang utuh, jika bukannya hanya akan menjadi negeri boneka asing atau bahkan terpecah-pecah atas beberapa negara yang lebih kecil. Jika pola seperti ini berlangsung di

---

dukungannya kepada rezim Bashar al-Assad. Melalui Presiden Iran, Hassan Rouhani menyampaikan, "Negara Iran akan tetap berada di sisi negara Suriah dalam memerangi terorisme dan menjaga integritas teritorial Suriah." Lihat Heriawan dan Siti Muslikhati, *Keputusan...*, hal. 4.

<sup>41</sup>Muhammad Affan, "Analisis...", hal. 153-154.

berbagai negeri dengan penduduk mayoritas Muslim, maka dunia Muslim akan menjadi semakin lemah dan tak berdaya.

Perang saudara yang menceraikan-beraikan negara Yugoslavia di jazirah Balkan juga ditengarai oleh para pengamat sosial-politik sebagai akibat dari *proxy war* yang kemudian membesar dan berubah menjadi perang yang mengerikan dan memecah negara Yugoslavia menjadi 8 negara-negara kecil (Schwartz 2007).<sup>42</sup> Kita semua umat beragama, dalam organisasi keagamaan dan keislaman apapun, dapat terlibat langsung maupun tidak langsung, teras atau tidak teras dapat terjebak dalam kumparan kabel listrik tegangan tinggi *proxy war* yang berakibat fatal dalam solidaritas kehidupan umat beragama, berbangsa dan bernegara jika kita masing-masing tidak paham, lengah dan tidak waspada terhadap akar-akar intoleransi keberagaman ini.<sup>43</sup>

Terpecahnya Muslim atas kekuatan-kekuatan kecil adalah sebuah bencana bagi Muslim dunia. Sejarah Muslim abad pertengahan telah mengajarkan bahwa setelah bubarnya Umayyah II di Andalusia, wilayah tersebut diperintah oleh berbagai emirat kecil yang perlahan tapi pasti, dibinasakan satu persatu sampai habis pada 1492 M.<sup>44</sup> Keruntuhan Grenada menjadi akhir pemerintahan Muslim di Andalusia sekaligus juga menandakan akhir dari eksistensi Muslim di Andalusia. Ketinggian budaya dan ilmu pengetahuan yang berhasil dicapai Muslim di Andalusia

---

<sup>42</sup>Stephen Sulaiman Schwartz, *Dua Wajah Islam: Moderatisme vs Fundamentalisme Dalam Wacana Global (The Two Faces of Islam)*, Terj. Hodri Arief, (Jakarta: Blantika, 2007).

<sup>43</sup>Amin Abdullah, "Menengok...", hal. 172.

<sup>44</sup>Phillip K. Hitti, *History of The Arabs*, Terj. Cecep Lukman Yasin, Dedi Slamet Riyadi, (Jakarta: Serambi. 2008), hal. 705.

hanya bisa dinikmati oleh Muslim di era modern sebagai sebuah romantisme sejarah yang memilukan.

#### **4. Perkembangan *Proxy War* dan Situasi Indonesia**

Sampai sejauh ini, perang proksi lebih banyak dipahami sebagai sebuah hubungan antara aktor dan proksinya yang ditandai dengan dukungan masif untuk berperang. Bagaimana aktor dapat membentuk proksi adalah persoalan yang kurang diperhatikan. Pada dasarnya, terdapat narasi yang sengaja dibangun oleh aktor untuk menciptakan proksi. Melalui narasi tersebut, proksi digiring untuk melakukan aksi demi kepentingan aktor. Intervensi pertama yang dilakukan oleh aktor perang proksi adalah memproduksi narasi kemudian mendistribusikannya kepada calon proksinya. Selain itu, aktor tidak hanya melakukan intervensi ketika konflik telah berlangsung, melainkan juga dapat melakukan intervensi dalam kerangka untuk menciptakan konflik melalui proksinya.<sup>45</sup>

Kini terminologi perang proksi menjadi meluas, terutama dengan melibatkan perang informasi yang bertujuan menciptakan konflik-konflik internal. Perang proksi yang lebih membahayakan adalah jika pelakunya bukan negara (*non state actor*) dan sering sulit diidentifikasi dengan caranya yang senyap. Di dalam dunia intelijen ada dikenal cara-cara infiltrasi semacam gerakan bawah tanah (operasi *clandestine*), dimana cara-cara demikian bisa sangat mungkin digunakan oleh musuh musuh negara untuk menyemai bibit-bibit perang proksi di masyarakat.<sup>46</sup>

Sekarang ini, teknologi modern (komunikasi dan informasi), seperti media elektronik, sosial media menjadi alat yang sangat ampuh untuk

---

<sup>45</sup>Muhammad Affan, "Analisis...", hal. 155.

<sup>46</sup>Ruli Mustafa, "Memahami..."

melakukan *proxy war*.<sup>47</sup> Distribusi narasi pembentuk proksi melalui jaringan internet dapat juga dikategorikan ke dalam peperangan proksi dengan *cyber mode*.<sup>48</sup> Media sosial telah menjadi bagian dari gaya hidup (*lifestyle*) sebagian masyarakat Indonesia untuk membangun jejaring yang spesifik berdasarkan visi, hobi, gagasan, asal daerah, profesi dan lainlain secara luas dan cepat tanpa sekat pembatas wilayah dan waktu.

Menurut Amin Abdullah,<sup>49</sup> Tahun 2017, sebenarnya sudah mulai 2 atau 3 tahun sebelumnya, dunia media sosial Indonesia dipadati dan dijejari berita bohong (*hoax*), serangan fajar *proxy war*, yang sengaja dibuat, direayasa, dimanipulasi untuk mengadu domba sesama anak bangsa, antar sesama pemimpin politik, pemimpin negeri, pemimpin agama, pejabat pemerintah, tokoh-tokoh organisasi keagamaan dan keislaman dan begitu seterusnya. Solidaritas sosial keagamaan dan kebangsaan diacak-acak dan dicabik-cabik oleh para pencari keuntungan dengan jualan berita bohong (*fake news*) untuk kepentingan politik sesaat.

Fenomena terorisme ISIS yang menggunakan Media Sosial sebagai alat untuk propaganda aksi terorisme dan merekrut pengikut lintas Negara merupakan contoh yang nyata bagaimana Media Sosial saat ini telah menjadi alat untuk meluncurkan *proxy war* secara efektif, dan mempunyai kemampuan mempengaruhi moral, semangat juang, budaya, nasionalisme

---

<sup>47</sup>M. Amin Abdullah, "Menengok...", hal. 171.

<sup>48</sup>Arab Spring adalah sebuah contoh bagaimana peperangan proksi mode *cyber* dijalankan. Narasi yang menggiring orang-orang untuk bergerak melakukan protes yang menuntut perubahan rezim telah didistribusikan secara masif melalui media sosial. Sehingga, jaringan media sosial memainkan peran penting dalam disintegrasi yang cepat pada kasus Tunisia dan Mesir. Lihat Ekaterina Stepanova, "The Role of Information Communication Technologies in the Arab Spring", dalam *Ponars Eurasia*, 15, (2011), hal. 1.

<sup>49</sup>M. Amin Abdullah, "Menengok...", hal. 173-174.

dari sebuah Bangsa khususnya generasi mudanya.<sup>50</sup> Inilah mengapa Marsekal Hadi menyampaikan bahwa keamanan dimensi *cyber* harus menjadi pertimbangan utama dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pertahanan dan keamanan nasional.<sup>51</sup>

Bagi Muslim di Indonesia, ancaman itu begitu nyata mengingat jumlah Muslim di negeri ini yang begitu besar. Besarnya ancaman ini juga ditunjang oleh pemakaian jaringan internet yang cukup besar. Menurut data yang dirilis oleh APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia), penetrasi pengguna internet di Indonesia berjumlah sekitar 143.26 juta jiwa.<sup>52</sup> Dari angka tersebut, tentu saja sebagian besarnya adalah Muslim. Dengan demikian, distribusi narasi yang membentuk proksi dari kalangan Muslim mendapat tempatnya di Indonesia.<sup>53</sup>

Selain masalah teknologi informasi dan komunikasi, perpecahan antar dan intern kelompok keagamaan, ada hal lain dari *proxy war* sekarang ini yang harus diwaspadai bangsa Indonesia. Seperti yang sudah pernah disinggung sebelumnya, bahwa *proxy war* bisa berbentuk ‘perang’

---

<sup>50</sup>Bambang Trisutrisno, “Merawat...”, hal. 2.

<sup>51</sup>Dimas Jarot Bayu, “Visi Misi Marsekal Hadi Bahas Ancaman Siber, Proxy War, dan Tiongkok”, dalam *Katadata*, Desember 2017. Lihat <https://katadata.co.id/berita/2017/12/06/visi-misi-marsekal-hadi-bahas-ancaman-siber-proxy-war-dan-tiongkok> diakses pada 13 Mei 2019, Pukul 10.21 WIB.

<sup>52</sup>APJII, *Penetrasi & Perilaku Pengguna Internet Indonesia*. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, Survei 2017.

<sup>53</sup>Salah satu bukti bagaimana Muslim Indonesia menjadi target dapat merujuk pada bagaimana IS bersedia mengalih bahasakan majalah propaganda mereka, Dabiq, kedalam Bahasa Indonesia. Penerbitan majalah Dabiq kedalam Bahasa Indonesia dan didistribusikan melalui jaringan internet adalah sebuah upaya IS menangkap peluang besar dari besarnya jumlah Muslim Indonesia yang menggunakan internet. Tentu bukan hanya IS yang sedang menjalankan perang proksinya kepada Muslim Indonesia. Masih ada banyak aktor lainnya yang juga sedang menjalankan peperangan proksi melalui distribusi narasi menggunakan jaringan internet dengan tujuan yang berbeda-beda. Muhammad Affan, “Analisis...”, hal. 160-161.

tanpa intervensi kekuatan militer, akan tetapi hanya memanfaatkan konflik lokal suatu bangsa. Kalau yang terjadi pada Perang Dingin dimotori oleh motif kekuasaan, keamanan dan politik, dalam beberapa kasus, *proxy war* terjadi karena dorongan kuat negara tertentu untuk menguasai sumber energi (yang pasti juga dibubuhi unsur politik) dari negara yang ditargetkan. Di awal sudah disebutkan, bahwa di masa yang akan datang, ketika energi fosil diprediksi menipis pada 2043, kawasan dengan sumber bio energi, menjadi wilayah perebutan dan menjadi ajang konflik sebagai akibat tarik-ulur kepentingan yang mengarah pada lokasi dan wilayah sumber pangan sekaligus sumber energi tersebut.<sup>54</sup>

Inilah yang menurut beberapa tokoh, sedang mengancam ketahanan dan keutuhan bangsa, serta tatanan masyarakat Indonesia. Ancaman ini menjadi semakin berbahaya tatkala masyarakat tak mampu mendeteksi bahwa bangsa ini sedang diporak-porandakan oleh pihak asing yang mengincar kekayaan negeri. Seperti yang dikatakan Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dalam beberapa kesempatan bahwa perang tanpa bentuk (*proxy war*) mengancam Indonesia, karena negara-negara luar berlomba-lomba ingin menguasai Indonesia yang kaya akan sumber daya alam.

Kita menyadari bahwa Indonesia memiliki kekayaan alam dan sumber daya manusia yang plural dan melimpah yang telah diberikan Tuhan kepada Indonesia.<sup>55</sup> Seperti yang pernah disampaikan Soekarno, “Aku tinggalkan kekayaan alam Indonesia, biar semua negara besar dunia

---

<sup>54</sup>Pada 2013, British Petroleum (BP) mengeluarkan sebuah laporan yang menyatakan bahwa sisa energi fosil dunia tinggal sekitar 40 tahun, sedangkan sisa energi fosil di Indonesia tinggal 16 tahun. Sehingga energi dunia akan habis pada 2053 dan Indonesia pada 2029 dengan asumsi bahwa kebutuhan energi dunia tidak meningkat. Padahal BP pada awal tahun ini memperkirakan bahwa konsumsi energi dunia pada 2035 meningkat sampai 41 persen dari kebutuhan hari ini.

<sup>55</sup>Safril Hidayat dan Wawan Gunawan, “Proxy...”, hal. 12.

iri dengan Indonesia, dan aku tinggalkan hingga bangsa Indonesia sendiri yang mengolahnya.” Perang Proxy telah berlangsung di Indonesia dalam bermacam bentuk, seperti gerakan separatis, militan IS/ISIS, Demonstrasi Massa, Hak Asasi Manusia, bentrok antar kelompok dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Lepasnya Timor Timur dari Indonesia dimulai dengan pemberontakan bersenjata, perjuangan diplomasi, sampai munculnya referendum, merupakan contoh Perang Proksi yang nyata.<sup>56</sup> Timor Timur adalah sebuah pulau yang masuk dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang menyimpan sumber daya alam yang melimpah ruah, seperti minyak dan gas bumi. Disinyalir, lepasnya Timor Timur tak lain akibat adanya peran Australia yang ingin menguasai cadangan minyak di Celah Timor. Campur tangan asing yang begitu banyak, termasuk tekanan dari kelompok yang mengatasnamakan Hak Asasi Manusia (HAM) hingga PBB, pada akhirnya membuat Indonesia bersedia melepaskan wilayah itu.

Tapi jika kembali melihat kesejarahan Indonesia, *proxy war* sudah terjadi sejak merdekanya Indonesia dari Belanda.<sup>57</sup> Presiden Soekarno mengatakan bahwa akan ada banyak ancaman di berbagai lini di Indonesia, dan semuanya dilakukan dengan sumber daya alam yang

---

<sup>56</sup>M. Cholil Nafis, “Tantangan..., hal. 2.

<sup>57</sup>Pada 1948 terjadi pemberontakan PKI/Muso. Pada saat itu bangsa Indonesia sedang sibuk menghadapi agresi Belanda kedua, di lain pihak PKI memanfaatkannya untuk melakukan pemberontakan. Pemberontakan Muso ini berafiliasi kepada Partai Komunis Uni Soviet, pada masa itu. Hal ini juga mencerminkan aksi politik yang bernuansa Perang *Proxy* karena Uni Soviet mendukung atau mengendalikan gerakan itu. Hal ini terjadi mengingat pada masa itu, dunia dilanda Perang Dingin antara Uni Soviet melawan Amerika Serikat. Sebagai kekuatan adidaya, Uni Soviet berkepentingan, menanamkan pengaruhnya di Indonesia. Selanjutnya lihat dalam Siswanto, “Aktualisasi..., hal. 80.

melimpah. Indonesia telah berusaha untuk melarikan diri dari cengkeraman perang proksi. Seperti gerakan Non-Blok adalah salah satu bentuknya. Dengan tidak menguntungkan salah satu blok, maka tidak akan ada negara yang sengaja mengendarai Indonesia untuk kepentingan mereka.<sup>58</sup>

Indonesia sebagai salah satu negara ekuator yang memiliki potensi vegetasi sepanjang tahun akan menjadi arena persaingan kepentingan nasional berbagai negara. Untuk itu, diperlukan langkah antisipasi agar keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia terjaga. Konflik-konflik di belahan dunia terjadi akibat persaingan kepentingan antarnegara untuk menguasai sumber energi. Salah satu contohnya adalah invasi Iraq ke Kuwait pada 2 Agustus 1990 –yang ada campur tangan Amerika yang melirik potensi minyak di negara tersebut– yang sudah disebutkan sebelumnya.

Selain itu, potret masalah akibat menipisnya persediaan kebutuhan kini sudah terlihat di mana-mana. Misalnya tumpahnya perang-perang di Mesir, Libya, Irak, Iran, Kuwait, Suriah, Sudan, Kongo, Yaman, Nigeria, dan Ukraina. Kenyataannya, energi tidak dapat diperbaharui, namun dapat digantikan. Ini yang dapat menjadi keuntungan Indonesia sebagai negara yang berada di garis ekuator. Sumber energi terbarukan dapat kita temukan dengan mudahnya di negara kita

Namun keadaan ini juga bisa membawa petaka, diperkirakan di tahun 2043, penduduk orang yang tinggal di luar ekuator akan menyerbu negara-negara dengan matahari sepanjang tahun untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ini akan menjadi pemantik perang energi yaitu pertempuran merebutkan pangan, air, dan sumber kehidupan lainnya.

---

<sup>58</sup>M. Cholil Nafis, “Tantangan...”, hal. 5.

Palagan pertempuran akan bergeser dari negara penghasil minyak ke negara subur. Indonesia sendiri merupakan negara kepulauan terbesar di ekuator, memiliki garis pantai terpanjang di dunia.

Posisi geografis Indonesia yang berada tepat di bawah garis khatulistiwa menempatkan Indonesia dalam wilayah tropis yang hanya merasakan dua jenis musim; kemarau dan penghujan. Sehingga di Indonesia bisa bercocok tanam sepanjang tahun. Indonesia juga masih memiliki lebih dari 5.000 m<sup>3</sup> air bersih per kapita per tahun. Dari sisi kepemilikan migas dan gas metana batu bara, sumur-sumur minyak, gas, dan simpanan batu bara di hampir di seluruh wilayah Indonesia telah diolah perusahaan-perusahaan asing yang memiliki modal besar.<sup>59</sup> Negara-negara tersebut antara lain Amerika Serikat, Inggris, Australia, Italia, Tiongkok, Malaysia, dan Norwegia.

Walau Indonesia tergabung dalam negara non blok dan perang dingin telah berakhir, namun dua kekuatan di dunia – dalam hal ini AS beserta sekutunya serta Tiongkok dan Rusia, masih terus membayangi. Kedua kekuatan ini, bisa dibilang sebagai bahaya laten yang bisa menjadi musuh proksi bagi Indonesia. Selain itu, posisi geopolitik Indonesia yang tepat di tengah negara-negara *Five Power Defense Arrangement* (FPDA), yaitu perjanjian kerja sama pertahanan negara-negara persemakmuran Inggris, menyimpan kerawanan yang patut menjadi perhatian serius. Indonesia juga dikelilingi negara-negara yang kerap mengancam teritori dan kedaulatan bangsa, seperti Australia, Filipina, dan Malaysia.

Belajar dari kasus Timor Timur, konflik Papua kemungkinan besar dibayangi oleh kekuatan Australia. Masalah HAM dan referendum juga merupakan isu yang dipakai agar Papua lepas dari Indonesia. Memanasnya

---

<sup>59</sup>M. Cholil Nafis, “Tantangan...”, hal. 2.

konflik di Papua belakangan ini, juga sangat mungkin berhubungan dengan upaya Pemerintah yang memaksa Freeport melakukan divestasi saham 51 persen. Melalui kelompok separatis, AS berupaya membuat kekacauan agar pemerintah Indonesia tunduk dan membatalkan peraturan tersebut. Negara-negara pemberi pinjaman serta pendonor terbesar, seperti Jepang, Singapura, Prancis, Jerman, Korea Selatan, dan Tiongkok, punya peluang besar memberi tekanan pada kebijakan Indonesia. Termasuk negara-negara yang tergabung dalam Bank Dunia, Asian Development Bank (ADB), dan Islamic Development Bank (IDB).

Di luar itu, kelompok radikal juga sangat mungkin menjadi musuh proksi Indonesia. ISIS bahkan telah terbukti menggunakan jaringan sporadisnya untuk melakukan tindakan radikal dan terorisme di Indonesia. Banyaknya ujaran-ujaran kebencian di media sosial, juga merupakan indikasi adanya ‘oknum’ yang sengaja ingin memecah belah bangsa. Menurut Amin Abdullah,<sup>60</sup> gerakan Islam transnasionalisme tersebut umumnya sekarang menjelma dalam bentuk *proxy war*. *Proxy war* yang saling mengadu domba, saling kafir-mengkafirkan, mendiskreditkan, mencemooh, mengejek, mengeluarkan dari kelompok dan tidak jarang yang berujung pada tindakan kekerasan (*violence*) bahkan perang sungguhan sesama anak bangsa.

Di sebelah utara, ada Malaysia dan Singapura, sedangkan di bagian selatan terdapat Australia dan Selandia Baru. Setidaknya tiga di antara empat negara tersebut pernah memiliki sejarah hubungan bilateral yang kurang harmonis dengan Indonesia. Untuk itu, kewaspadaan terhadap keamanan nasional harus ditingkatkan, dan hal ini bisa diwujudkan dengan persatuan bangsa. Persatuan bangsa adalah kunci bagi pertahanan negara

---

<sup>60</sup>M. Amin Abdullah, “Menengok..., hal. 171-172.

untuk bisa tetap kokoh dan selamat dari berbagai tantangan baik yang terang-terangan maupun terselubung.

Sebab, seperti yang tuliskan oleh Cholil,<sup>61</sup> Indonesia masih rentan dengan berbagai serangan dari luar, terutama melalui pihak ketiga non negara. Seperti organisasi kemasyarakatan, Lembaga Sosial Keagamaan dan perkumpulan. Selain itu masyarakat Indonesia masih goyah tentang komitmen persatuan dan kesatuannya. Sebab Indonesia memiliki beberapa kelemahan yang mudah disusupi oleh pihak luar.

a. Belum mampu merangkul keanekaragaman sepenuhnya

Masyarakat Indonesia sangat heterogen. Memiliki banyak ras, etnis, dan agama yang bisa menjadi bumerang bagi Indonesia. Karena perbedaan sudut pandang sering menjadi penyebab konflik yang dapat diperbesar secara bertahap. Kita mungkin memiliki kesatuan dalam keragaman, tetapi untuk mewujudkan cita-cita itu bisa dibilang sangat sulit, bahkan membutuhkan perjuangan yang tidak kecil.

Baru-baru ini kita disibukkan dengan perdebatan soal legalisasi Lesbi, Gay, Transgender, dan Transeksual (LGBT). Bahkan sedang berlangsung dan marak di daerah-daerah tentang benih-benih konflik antar paham keagamaan, seperti paham Syi'ah dan Wahabi, paham Hizbut Tahrir dan Banser, Gerakan Pemuda Ansor, paham Libral dan paham radikal. Semua itu berpotensi digunakan oleh pihak luar untuk menyerang kekuatan negara sehingga terjadi pecah belah dan membuka pintu asing untuk intervensi dan mengeruk kekayaan Indonesia.

b. Masalah kemiskinan yang menjadi celah intervensi pihak luar

Banyak orang di Indonesia yang hidup dalam kesulitan. Kemiskinan di mana-mana, terutama di daerah yang menghasilkan sumber daya alam

---

<sup>61</sup>M. Cholil Nafis, "Tantangan...", hal. 5-6.

yang besar. Dari sini, pintu masuk negara atau kelompok tertentu untuk menciptakan organisasi pembebasan atau milisi. Mereka memberikan iming-iming kehidupan yang layak untuk membuat mereka semangat melakukan pemberontakan. Hal ini terfleksikan dalam kasus referendum Timor Timur dan konflik-konflik yang terus terjadi di Papua.

c. Mudah terprovokasi dengan berita

Sebagian bangsa Indonesia mudah terprovokasi oleh isu-isu tertentu. Tidak sekali atau dua kali, bangsa ini gembira dengan isu-isu nyata palsu dan tidak layak dibahas. Perkembangan media sosial di Indonesia juga menjadi pemicu mengapa isu yang memprovokasi perpecahan sangat mudah berkembang di Indonesia. Masyarakat media sosial telah menampilkan dan meyakinkan dunia dengan kekuatan ruang maya sebagai sebuah keniscayaan bahwa dunia maya itu ada dan isu yang dikemas dalam bentuk opini, informasi dan tulisan panjang merupakan sebuah informasi yang dapat dipercaya.<sup>62</sup>

Berita atau berbagai informasi instan yang bermunculan di media sosial akan ditelan mentah-mentah oleh *netizen* tanpa menyadari tidak sedikit dari informasi tersebut yang hadir sebagai sebuah bentuk propaganda yang bermaksud untuk memecah belah. Akhirnya, masyarakat dengan mudah terseret provokasi dengan berita yang dimanipulasi oleh kelompok tertentu atau negara yang tujuannya untuk mendominasi Indonesia.

---

<sup>62</sup>Sri Ayu Astuti, "Media Sosial Sebagai Ruang Publik Antara Netiket dan Netizen", dalam *Jurnal KANAL*, Vol. I, No. 2, (2013), hal. 206.

## 5. 'PR' Bagi Indonesia dalam Menyiasati Tantangan *Proxy War*

Ada beberapa tantangan yang disebutkan oleh Komandan Sesko TNI Letjen Agus Sutomo,<sup>63</sup> yang kalau tidak segera dicegah, maka perpecahan, kerusakan, kerusuhan, dan kehancuran bangsa ini akan hadir di depan mata, jika hal ini terjadi, kita akan kembali pada masa di mana Indonesia berada dalam bayang-bayang tangan asing yang memperlakukan bangsa ini seperti boneka. Tantangan tersebut di antaranya:

- a. Penguasaan media massa untuk melakukan pembentukan opini, rekayasa sosial, dan kegaduhan masyarakat;
- b. Mengadu domba TNI dan Polri lewat berbagai cara sehingga terjadi kekacauan dan gangguan stabilitas sosial;
- c. Mendapatkan/melobi pemimpin Indonesia sedini mungkin sehingga memihak dan dapat dikendalikan asing;
- d. Investasi besar-besaran ke Indonesia;
- e. Mengeksploitasi sumber alam dan menjadikan Indonesia sebagai pasar untuk menjual produk asing; dan
- f. Menghancurkan generasi muda Indonesia melalui berbagai budaya negatif seperti perilaku konsumtif, judi, narkoba, dan LGBT.

Hal-hal inilah yang dimaksud sebagai *proxy war* atau perang yang masuk ke sendi-sendi kehidupan yang beragam. *Proxy war* dilakukan oleh *non-state actor*, tapi dikendalikan oleh *state*, indikasinya ditunjukkan dengan gerakan separatis, demo anarkis, sistem regulasi dan perdagangan yang merugikan, peredaran narkoba dan masih banyak lagi. Menurut

---

<sup>63</sup>Hasil *Studium Generale* ini disarikan dalam Vinskatania Agung A, *Lawan Proxy War Menuju Indonesia Emas 2045*, (2016). Lihat <https://www.itb.ac.id/news/5100.xhtml> diakses pada 9 Mei 2019, Pukul 10.03 WIB.

Komandan Sesko, inilah gambaran *invisible hands* yang mendesain berbagai bentuk opini kebencian agar menjadi candu dan membuat masyarakat ketagihan bertengkar.

Pada dasarnya, menurut Affan,<sup>64</sup> *proxy war* di Indonesia baru berada pada fase distribusi narasi dan pembentukan proksi-proksi, belum berkembang ke fase aksi yang membinasakan seperti di Suriah. Pada dasarnya, fase ini adalah fase yang sangat menentukan, namun seringkali luput dari deteksi. Hal ini disebabkan kewaspadaan yang kurang dari Muslim sendiri. Indikasi ini dapat dilihat pada sangat sedikitnya literatur *Islamic studies* di Indonesia yang menjadikan perang proksi sebagai subjek kajian.

Sehingga, ancaman perang proksi sendiri sering diremehkan oleh beberapa kalangan Muslim Indonesia sendiri. Di sisi lain, kalangan Muslim Indonesia yang menanggapi wacana ancaman ini, cenderung memahami perang proksi hanya pada tingkat aksi, dimana proses pembentukan narasinya menjadi terabaikan. Oleh sebab itu juga, mencegah terbentuknya proksi menjadi tantangan baru dalam dinamika Muslim di Indonesia. Ini penting, jika Muslim Indonesia tidak ingin tercerai-berai dan dimiskinkan oleh perang.

Sudah waktunya masyarakat dari berbagai elemen bersatu, terutama bagi kaum intelek seperti mahasiswa, untuk hadir di tengah-tengah masyarakat dan senantiasa membangun suasana yang guyub serta konstruktif demi keutuhan bangsa.

---

<sup>64</sup>Muhammad Affan, "Analisis...", hal. 161.

### C. Simpulan

*Proxy war* kini menjadi ancaman bagi kedaulatan berbagai bangsa, tak terkecuali dunia Muslim, baik itu negara Islam atau negara bangsa dengan mayoritas masyarakatnya Islam, seperti Indonesia. Mengapa? Karena faktanya, sebagian besar masyarakat Muslim di berbagai belahan dunia masih sangat rentan terhadap unsur-unsur yang mampu memecah belah, yang tidak disadari menjadi benih ataupun celah intervensi pihak luar atau pihak ketiga, untuk melancarkan agenda mereka masing-masing, yang mana sebagian besar agenda pihak ketiga ini adalah penjamahan terhadap kekayaan lokal yang berlimpah. Seperti yang terjadi di Iraq, dan sebagian wilayah Timur Tengah yang kekayaan alamnya selalu diincar pihak luar, sama halnya dengan Indonesia, seperti kasus referendum Timor Timur, yang melibatkan Australia.

Terwujudnya *proxy war* ini sebagian besar dengan memanfaatkan potensi konflik lokal yang ada. Lalu, bagaimana sebuah bangsa dapat bertahan dan melawan serangan dari pihak luar jika persatuan internal tidak mampu dibangun? Di sini jelas, bahwa tidak ada cara lain selain memperkuat persatuan bangsa. Persatuan bangsa adalah harga mati bagi kekokohan ketahanan nasional. Jika secara internal saja sudah porak-poranda, maka tidak heran jika pihak luar atau pihak asing akan dengan mudah mendominasi suatu bangsa, seperti yang terjadi di Arab Saudi dan Indonesia kini.

*Proxy war* ini seringkali sulit dideteksi, mana kawan dan mana lawan, apalagi di situasi masyarakat yang terpecah belah. Jadi dengan eratnya persatuan internal bangsa, kita hanya akan fokus pada musuh yang sesungguhnya. Pihak-pihak yang jelas-jelas ingin mengeruk keuntungan dari sebuah bangsa. Jadi, cara terbaik untuk melawan *proxy war* adalah

dengan mengenali musuh, kemampuan mengenali musuh ini bisa kita peroleh jika kesadaran masyarakat akan pentingnya kesatuan dan persatuan bangsa sudah muncul. Karena, secara realita dengan melihat konflik-konflik yang terjadi, untuk Indonesia, masih jauh panggang dari api dalam hal persatuan bangsa.

### **Daftar Rujukan**

- A. Heywood, *Global Politics*, (Basingstoke: Palgrave Foundation, 2011).
- Andrew Mumford, "Proxy Warfare and The Future of Conflict", dalam *The RUSI Journal*, Volume 158, Number 2, (May 2013).
- APJII, *Penetrasi & Perilaku Pengguna Internet Indonesia*. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, Survei 2017.
- Bambang Trisutrisno, "Merawat Sumpah Pemuda untuk Menghadapi Proxy War", *Artikel*, (t.t).
- Chris Loveman, "Assessing the Phenomenon of Proxy Intervention", dalam *Conflict, Security and Development*, Vol. 2, No. 3, (December 2002).
- Dick Simpson, James Nowlan, Elizabeth O'Shaughnessy, *The Struggle for Power and Influence in Cities and States*, 1st Edition, (London: Pearson, 2010).
- E.J. Wilson, "Hard Power, Soft Power, Smart Power", dalam *ANNALS of the American Academy of Political and Social Sciences*, Issue 616, (2008).
- Ekaterina Stepanova, "The Role of Information Communication Technologies in the Arab Spring", dalam *Ponars Eurasia*, 15, (2011).
- Farida Haryoko, "Pangkostrad Letjen TNI Gatot Nurmantyo Ajak Mahasiswa Pangkostrad Letjen TNI Gatot Nurmantyo Ajak Mahasiswa Menangkal Proxy War", dalam *Siaran Pers Universitas Indonesia*, (10 Maret 2014).
- G. Gallarotti, "Soft Power: what it is, it's importance, and the conditions for its effective use", dalam *Journal of Political Power*, Vol. IV, No. 1, (2011).

- Heriawan dan Siti Muslikhati, *Keputusan Arab Saudi Melakukan Perang Proksi terhadap Iran di Konflik Suriah 2011-2018*, Naskah Publikasi, (Prodi HI, FISIP, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018).
- John B Alterman, “The Age of Proxy Warfare”, dalam *Middle East Notes and Comment*, CSIS Middle East Program, (May 2013).
- Jon Abbink, “Ethiopia-Eritrea: Proxy Wars and Prospects of Peace in the Horn of Africa”, dalam *Journal of Contemporary African Studies*, 21, 3, (September 2003).
- Joseph S. Nye, *Soft Power: The Means To Success In World Politics*, (New York: Public Affairs, 2004).
- Joseph S. Nye, *Understanding International Conflicts* 7th Edition, (New York: Pearson, 2009).
- M. Amin Abdullah, “Menengok Kembali Peran Agama di Ruang Publik”, dalam *Jurnal Sosiologi Agama*, Vol. XI, No. 2, (Juli-Desember 2017).
- M. Cholil Nafis, “Tantangan Indonesia dalam Menghadapi Proxy War di Era Globalisasi”, *Artikel*, (t.t).
- Mayor Inf Dony Gerdinand, “Pendidikan Pendahuluan Bela Negara di Era Proxy War”, dalam *Jurnal Sekolah Staf dan Komando TNI AD*, (Edisi Khusus, November 2016).
- Michael A. Innes, *Making Sense of Proxy Wars: States, Surrogates & the Use of Force*, (Dulles Virginia: Potomac Books, 2012).
- Mike Stillman, *Proxy Wars: The Business of War*, (Indiana: Trafford on Demand Pub, 2008).
- Muhammad Affan, “Analisis dan Tantangan Muslim Indonesia di Era Perang Proksi”, dalam *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. XVIII, No. 2, (2018).
- Phillip K. Hitti, *History of The Arabs*, Terj. Cecep Lukman Yasin, Dedi Slamet Riyadi, (Jakarta: Serambi. 2008).
- Robert Heinsch, “Conflict Classification in Ukraine: The Return of the Proxy War?”, dalam *Int’l L. Stud. Ser. US Naval War Col.* 91, (2015).

- Safril Hidayat dan Wawan Gunawan, “Proxy War dan Keamanan Nasional Indonesia: Victoria Concordia Crescit”, dalam *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*, Vol. VII, No. 1, (April 2017).
- Siswanto, “Aktualisasi Pancasila sebagai Strategi Menangkal Perang Proxy di Indonesia”, dalam *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*, Vol. VII, No. 1, (April 2017).
- Sri Ayu Astuti, “Media Sosial Sebagai Ruang Publik Antara Netiket dan Netizen”, dalam *Jurnal KANAL*, Vol. I, No. 2, (2013).
- Stephen Sulaiman Schwarts, *Dua Wajah Islam: Moderatisme vs Fundamentalisme Dalam Wacana Global (The Two Faces of Islam)*, Terj. Hodri Arief, (Jakarta: Blantika, 2007).
- Tim Dunne & Brian C. Schmidt, “Realism”, dalam John Baylis & Steve Smith (Eds), *The Globalization of World Politics*, 2nd edition, (Oxford: Oxford University Press, 2001).
- Yaacov Bar Simantov, “The Strategy of War by Proxy”, dalam *Cooperation and Conflict*, No. XIX, (New York: Middle East Institute, Columbia University and Department of International Relations, The Hebrew University of Jerusalem, 1984).